



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2010**

**TENTANG**

#### **SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.

5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAKBLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
15. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
16. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
18. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

## **BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) RSUD menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

## **BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RSUD**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD.

### **Pasal 4**

Periode akuntansi RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Pasal 5**

- (1) RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSUD yang bersangkutan.
- (2) RSUD menyelenggarakan SAKBLUD.
- (3) SAKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara komputerisasi.

### **Pasal 6**

- (1) Sistem akuntansi keuangan RSUD menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK.
- (2) Sistem akuntansi keuangan RSUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
  - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan RSUD adalah basis akrual;
  - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
  - c. sistem akuntansi RSUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

### **Pasal 7**

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan akun standar.

### **Pasal 8**

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengertian/pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.

### **Pasal 9**

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
  - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. buku jurnal penerimaan kas;
  - b. buku jurnal pengeluaran kas;
  - c. buku jurnal umum;
  - d. buku besar/buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 10**

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV PELAPORAN KEUANGAN RSUD**

### **Pasal 11**

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, RSUD menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. neraca;
- b. laporan operasional;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 12**

RSUD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan setiap triwulan.

**Pasal 13**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Walikota melalui PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

**BAB V****LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI****Pasal 14**

- (1) Laporan keuangan RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RSUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK.

**BAB VI****REVIU DAN AUDIT****Pasal 15**

- (1) Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengendalian intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, reviu dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan keuangan RSUD.

**Pasal 16**

Laporan Keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh pemeriksa eksternal.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Semua transaksi yang telah dilakukan oleh RSUD mulai 1 Januari 2010 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, wajib menggunakan SAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Juni 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 11 JUNI 2010**

---

## **PROSEDUR AKUNTANSI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PENGERTIAN**

Informasi keuangan rumah sakit merupakan salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh banyak kalangan. Stakeholder rumah sakit seperti Pemerintah Kota Surabaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Perbankan, Investor, masyarakat maupun internal manajemen sendiri memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui, mengawasi dan mengambil kebijakan atau keputusan dalam menjalankan manajemen rumah sakit.

Untuk memenuhi tujuan tersebut perlu disusun prosedur dan sistem akuntansi keuangan yang dapat menghasilkan informasi yang berguna, cepat, tepat, dan akurat.

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan *clerical/kerani*, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi rumah sakit yang sering terjadi.

Sistem akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur akuntansi yang saling berhubungan, disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan akuntansi keuangan.

Prosedur akuntansi yang cukup memadai, dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada penyajian data transaksi keuangan dalam laporan keuangan dengan menggunakan buku jurnal, buku besar dan buku pembantu sebagai alat dokumentasinya, secara kronologis dan sistematis dalam setiap tahapan prosedur akuntansi.

Kronologis berarti bahwa setiap transaksi keuangan harus dicatat dan diikhtisarkan secara urut menurut tanggal terjadinya. Sistematis lebih terkait dengan keharusan bahwa transaksi keuangan dengan klasifikasi yang sama harus ditangani dengan prosedur yang seragam. Sedangkan transaksi keuangan yang menjadi obyek pengurusan sistem akuntansi adalah keseluruhan transaksi yang dihasilkan oleh aktivitas suatu entitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada aset, kewajiban dan ekuitas dana dari entitas yang bersangkutan.

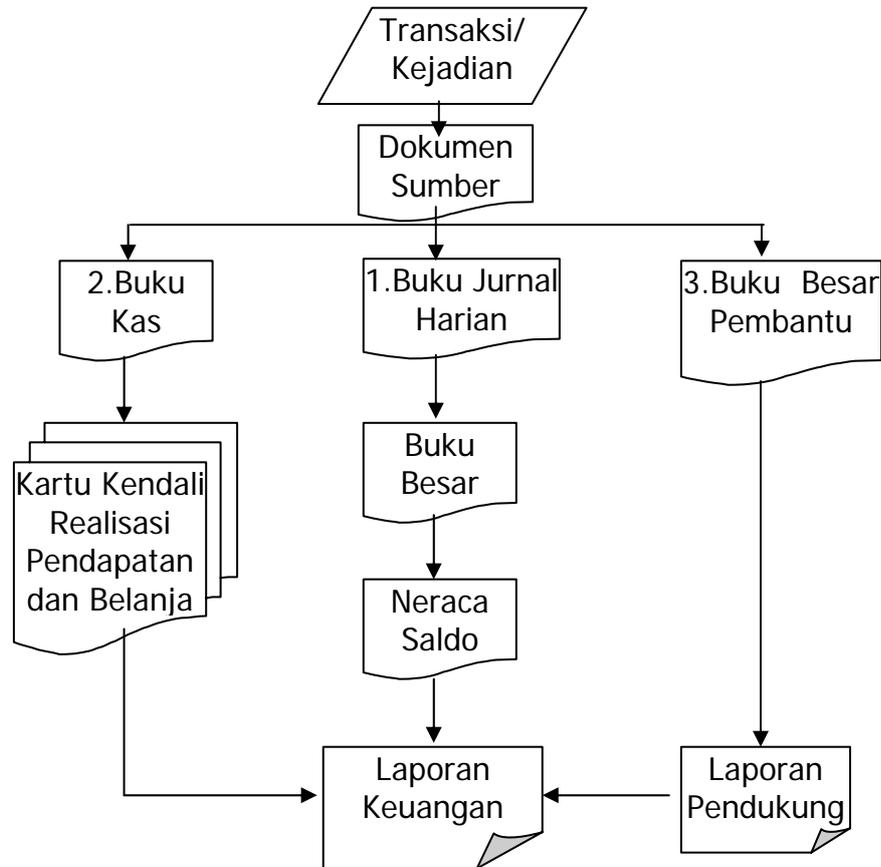
Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, umumnya ada tiga klasifikasi utama, yaitu transaksi kas, aset tetap dan transaksi non kas. Transaksi kas sendiri merupakan transaksi dominan. Oleh karenanya khusus untuk transaksi kas, dirinci lagi dalam dua kelompok besar yaitu transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk mengakomodasi transaksi di atas, prosedur akuntansi yang diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, terdiri atas prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan prosedur akuntansi non kas.

## **B. SIKLUS AKUNTANSI**

Fungsi pembukuan atas transaksi keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohamad Soewandhie Kota Surabaya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

Output dari siklus akuntansi berupa Laporan Keuangan Pokok yang terdiri atas Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Siklus akuntansi/pembukuan dimulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan dapat terlihat melalui bagan alur sebagai berikut:



Penjelasan atas alur akuntansi tersebut sebagai berikut :

- a. transaksi yang terjadi dicatat ke dalam dokumen yang merupakan bukti dasar pembukuan (bisa berupa dokumen sumber maupun pendukung);
- b. berdasarkan dokumen transaksi keuangan, selanjutnya secara harian dicatat ke dalam Buku Harian/Jurnal, yang terdiri atas :
  1. Buku Jurnal Penerimaan Kas;
  2. Buku Jurnal Pengeluaran Kas Kecil;
  3. Buku Jurnal Umum.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian, transaksi tersebut dicatat pula ke dalam Buku Besar Pembantu dan Kartu Kendali Anggaran.

- c. jumlah kumulatif transaksi yang tercatat pada Buku Harian/Jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam Buku Besar;
- d. Buku Besar berfungsi sebagai media perantara untuk memudahkan penyusunan Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. selanjutnya rincian yang diperlukan untuk akun-akun yang terdapat di dalam Laporan Keuangan dapat dibuat Buku Besar Pembantu. Buku Besar Pembantu diselenggarakan sebagai rincian dari akun-akun Buku Besar tertentu. Tiap jenis Buku Besar Pembantu dibuatkan saldo per akhir bulan untuk dicocokkan/direkonsiliasi dengan saldo buku besar yang bersangkutan;
- f. pada akhir tanggal pelaporan saldo-saldo dalam buku besar dipindahkan ke Neraca Saldo sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan.

## **BAB II**

### **PROSEDUR AKUNTANSI**

Prosedur akuntansi yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya didasarkan atas beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya sebagai Badan Layanan Umum Daerah dicatat pada Buku Jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan;
- b. transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam Buku Jurnal selanjutnya diposting ke dalam Buku Besar sesuai dengan rekening berkenaan secara periodik;
- c. Buku Besar tersebut ditutup dan diringkaskan pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan;
- d. Buku Besar tersebut dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu;
- e. saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Prosedur akuntansi yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya terdiri atas :

1. prosedur akuntansi penerimaan kas;
2. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
3. prosedur akuntansi selain kas.

Penjelasan masing-masing prosedur akuntansi sebagai berikut

### **1. Prosedur akuntansi penerimaan kas**

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi penerimaan kas dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi perbantuan komputer.

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Rumah Sakit Umum Daerah Soewandhie Kota Surabaya dilaksanakan oleh Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

fungsi yang terkait :

- a. Bendahara Penerimaan;
- b. bidang pelayanan (Pengendali Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta);
- c. Verifikator Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta;
- d. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

bukti transaksi yang digunakan :

- a. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);
- b. Surat Tanda Setor;
- c. dokumen persetujuan klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta;
- d. Laporan Hasil Verifikasi oleh Verifikator Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta;
- e. Kuitansi Penerimaan;
- f. Rekapitulasi Penerimaan Harian Bendahara Penerimaan.

Buku yang Digunakan :

- a. Buku Jurnal Penerimaan Kas;
- b. Buku Besar; dan
- c. Buku Besar Pembantu.

Langkah Kerja :

- a. Sub Bagian Akuntansi melalui aplikasi akuntansi yang terkoneksi dengan aplikasi penatausahaan mencetak jurnal penerimaan kas kemudian melakukan evaluasi;
- b. evaluasi terhadap jurnal penerimaan kas dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian rekening dan kebenaran jumlah jurnal transaksi dengan bukti transaksi yang diterimanya dari bendahara penerimaan, bidang pelayanan dan Verifikator Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta;
- c. bila terdapat kesesuaian, Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan bahwa transaksi telah dicatat dan diikhtisarkan dengan benar;
- d. pada setiap akhir bulan dilakukan pencetakan Buku Besar, Buku Pembantu dan Laporan Keuangan yang diperlukan.

## **2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi perbantuan komputer.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dilaksanakan oleh Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

fungsi yang terkait :

- a. Bendahara Pengeluaran;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

bukti transaksi yang digunakan:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPM-UP);
- b. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPM-GU);
- c. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU);
- d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPM-LS);
- e. Nota Permintaan Panjar;
- f. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- h. Nota Debet bank;
- i. Bukti Transaksi Pengeluaran Kas lainnya.

Buku yang digunakan :

- a. Buku Jurnal Pengeluaran Kas;
- b. Buku Besar; dan
- c. Buku Besar Pembantu.

Langkah Kerja :

- a. Sub Bagian Akuntansi melalui aplikasi akuntansi yang terkoneksi dengan aplikasi penatausahaan mencetak jurnal pengeluaran kas kemudian melakukan evaluasi;
- b. evaluasi terhadap jurnal pengeluaran kas dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian rekening dan kebenaran jumlah jurnal transaksi dengan bukti transaksi yang diterimanya dari Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- c. bila terdapat kesesuaian, Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan bahwa transaksi telah dicatat dan diikhtisarkan dengan benar;
- d. pada setiap akhir bulan dilakukan pencetakan Buku Besar, Buku Pembantu, dan Laporan Keuangan yang diperlukan.

### **3. Prosedur akuntansi selain kas**

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi selain kas dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi perbantuan komputer.

Prosedur akuntansi selain kas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dilaksanakan oleh Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

fungsi yang terkait :

- a. Bendahara Pengeluaran;
- b. Verifikator Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta;
- c. Kepala Bagian Keuangan;
- d. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

bukti transaksi yang digunakan :

- a. Saldo Awal Perkiraan Neraca;
- b. Nota Utang;
- c. Laporan Hasil Verifikasi;
- d. dokumen Klaim Pasien Umum;
- e. Bukti Transaksi selain kas lainnya.

Buku yang digunakan:

- a. Buku Jurnal Pengeluaran Kas;
- b. Buku Besar; dan
- c. Buku Besar Pembantu.

Langkah Kerja :

- a. terhadap saldo awal perkiraan neraca, Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi melakukan jurnal neraca awal, sedangkan terhadap transaksi selain kas yang terjadi setelah tanggal neraca awal, Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi melakukan input data transaksi berdasarkan dokumen sumber yang diterimanya dari Bendahara Pengeluaran, Verifikator Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta dan Kepala Bagian Keuangan;
- b. Operator Akuntansi mencetak jurnal transaksi selain kas untuk dievaluasi oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- c. evaluasi terhadap jurnal transaksi selain kas dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian rekening dan kebenaran jumlah jurnal transaksi dengan bukti transaksi yang diterimanya dari Bendahara Pengeluaran, Verifikator Jaminan Kesehatan Masyarakat/Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/swasta dan Kepala Bagian Keuangan;

- d. bila terdapat kesesuaian, Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan bahwa transaksi telah dicatat dan diikhtisarkan dengan benar;
- e. pada setiap akhir bulan dilakukan pencetakan Buku Besar, Buku Pembantu dan Laporan Keuangan yang diperlukan.

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN BUKU-BUKU PENCATATAN TRANSAKSI**

Penyelenggaraan buku-buku pencatatan atas transaksi sebagai media dokumentasi proses pencatatan transaksi yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

Dokumen-dokumen yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi sebagai berikut :

1. Buku Jurnal, yang terdiri dari:
  - a. Buku Jurnal Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan;
  - b. Buku Jurnal Penerimaan Kas Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. Buku Jurnal Pengeluaran Kas Kecil;
  - d. Buku Jurnal Umum.
2. Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.

Penjelasan masing-masing Buku Pencatatan Transaksi di atas, diuraikan sebagai berikut :

1. Buku Jurnal Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan

Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas oleh Bendahara Penerima.

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan penerimaan kas oleh Bendahara Penerima pada umumnya berupa :

- a. penerimaan kas dari jasa layanan kesehatan;
- b. lain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu parkir, sewa fasilitas/gedung, diklat dan peralatan Rumah Sakit Umum Daerah.

## 2. Buku Jurnal Penerimaan Kas Badan Layanan Umum Daerah

Buku Jurnal Penerimaan Kas Badan Layanan Umum Daerah merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi penyetoran kas oleh Bendahara Penerimaan ke kas Rumah Sakit Umum Daerah.

## 3. Buku Jurnal Pengeluaran Kas Kecil

Buku Jurnal Pengeluaran Kas Kecil merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas kecil oleh Bendahara Pengeluaran.

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas kecil pada umumnya berupa pembayaran untuk biaya dan hutang.

## 4. Buku Jurnal Umum

Buku Jurnal Umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas.

Transaksi atau kejadian non kas yang tercakup dalam Buku Jurnal Umum sebagai berikut :

- a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan;
- b. pengisian kas kecil Bendahara Pengeluaran dan Kas Badan Layanan Umum Daerah;
- c. koreksi kesalahan pencatatan atas transaksi yang telah dibukukan dalam Buku Jurnal dan telah diposting ke Buku Besar;
- d. penerimaan/pemberian hibah selain kas dari pihak ketiga;
- e. pembelian secara kredit atas transaksi pembelian barang/aset tetap;
- f. retur pembelian kredit (pengembalian) atas pembelian barang/aset tetap yang telah dibeli secara kredit;
- g. pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas kepada pihak ketiga;
- h. penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas akibat adanya tukar-menukar (*ruilslaag*) dengan pihak ketiga.

## 5. Buku Besar

Buku Besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat peringkasan (*posting*) semua transaksi atau kejadian selain kas dari Jurnal Penerimaan Kas maupun Pengeluaran Kas ke dalam Buku Besar untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Buku Besar pada dasarnya terdiri dari sekumpulan akun yang digunakan untuk menampung akun yang telah dicatat dan digolongkan dalam Buku Jurnal.

## 6. Buku Besar Pembantu

Buku Besar Pembantu merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi dan kejadian yang berisi rincian item buku besar untuk setiap akun yang dianggap perlu.

Akun-akun dalam Buku Besar yang umumnya memerlukan Buku Pembantu adalah Kas, Piutang, Persediaan, Aktiva Tetap dan Utang. Beberapa akun obyek pendapatan dan obyek belanja umumnya juga memerlukan Buku Besar Pembantu.













## BAB IV

### JURNAL STANDAR

#### A. Jurnal Transaksi

1. pencatatan transaksi penerimaan kas atas pendapatan tunai oleh Bendahara Penerimaan.

Dokumen Sumber : Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP).

Buku Jurnal : Jurnal Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.xx.xx.	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
7.1.1.xx.xx.	Pendapatan .....		xxx

contoh:

Pasien umum, bernama Umar membayar biaya rawat inap selama 10 (sepuluh) hari dengan total biaya sebesar Rp. 450.000,00. (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Jurnal yang diperlukan guna mencatat transaksi penerimaan kas tersebut sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan	450.000	
7.1.1.10.00.	Pendapatan Rawat Inap		450.000

2. pencatatan transaksi penyetoran kas ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah atas pendapatan tunai oleh Bendahara Penerimaan.

Dokumen Sumber : Surat Tanda Setoran (STS).

Buku Jurnal : Jurnal Penerimaan Kas Badan Layanan Umum Daerah.

Jurnal:

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.xx.xx.	Kas di BLUD	xxx	
1.1.1.xx.xx.	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

contoh:

Pada akhir hari Bendahara Penerima menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Jurnal yang diperlukan guna mencatat transaksi penerimaan kas tersebut sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.04.01.	Kas di BLUD	20.000.000	
1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		20.000.000

3. pencatatan transaksi pengajuan klaim pasien yang dijamin Asuransi Kesehatan/Perusahaan Kerjasama/Jaminan Kesehatan Masyarakat/Pemerintah Daerah.

Dokumen Sumber : Dokumen Klaim Asuransi Kesehatan/  
Perusahaan Kerjasama/Jaminan Kesehatan  
Masyarakat/Pemerintah Daerah.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.4.xx.xx.	Piutang Usaha	xxx	
7.1.1.xx.xx.	Pendapatan .....		xxx

contoh:

Pasien peserta Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil bernama Anita, menjalani rawat inap 10 (sepuluh) hari dengan total biaya Rp. 3.000.000,00. (tiga juta rupiah) tetapi pasien dirawat dengan naik kelas, sehingga Anita harus menambah biaya perawatan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pada saat pengajuan klaim kepada PT. Asuransi Kesehatan, jurnal yang diperlukan adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.4.07.01	Piutang Usaha	2.500.000	
7.1.1.10.00	Pendapatan Rawat Inap		2.500.000

Jurnal yang diperlukan guna mencatat transaksi atas penambahan jenjang jasa pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan tersebut sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	500.000	
7.1.1.10.00	Pendapatan Rawat Inap		500.000

4. pencatatan transaksi penerimaan kas dari realisasi klaim pasien yang dijamin Asuransi Kesehatan/Perusahaan Kerjasama/Pemerintah Daerah.

Dokumen Sumber :Nota Kredit Bank/Dokumen Persetujuan/Laporan Hasil Verifikasi.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
7.1.1.xx.xx	Penyesuaian Kontraktual	xxx	
1.1.4.xx.xx	Piutang Usaha		xxx

catatan: \*) Kas diterima + penyesuaian kontraktual

contoh:

Diterima pembayaran klaim piutang dari PT. Asuransi Kesehatan atas nama Anita sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas atas klaim piutang pasien dari PT. Asuransi Kesehatan ini sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.02.01	Kas di BLUD	2.500.000	
1.1.4.07.01	Piutang Usaha		2.500.000

Jika realisasi penerimaan piutang Asuransi Kesehatan ternyata hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih kecil dari nilai tagihan pada PT. Asuransi Kesehatan, jurnal standarnya sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.02.01	Kas di BLUD	2.000.000	
7.1.1.99.00	Penyesuaian Kontraktual	500.000	
1.1.4.07.01	Piutang Usaha		2.500.000

Sedangkan bila realisasi penerimaan piutang Asuransi Kesehatan ternyata Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau lebih besar dari nilai klaim Asuransi Kesehatan yang ditagihkan, maka jurnalnya sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.02.01	Kas di BLUD	2.800.000	
1.1.4.07.01	Piutang Usaha		2.500.000
7.1.1.99.00	Penyesuaian Kontraktual		300.000

5. pencatatan transaksi penerimaan dana droping Jaminan Kesehatan Masyarakat

Dokumen Sumber : Dokumen Penerimaan Dana Droping Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.6.01.01	Kas Dana Droping Jamkesmas Pusat	xxx	
2.1.5.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

contoh :

Diterima dana droping dari pusat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jurnal untuk mencatat penerimaan droping dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dari pusat sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.6.01.01	Kas Dana Droping Jamkesmas Pusat	500.000.000	
2.1.5.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka		500.000.000

6. pencatatan transaksi penerimaan kas atas realisasi klaim pasien yang dijamin dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Dokumen Sumber : Nota Kredit Bank/Dokumen Persetujuan Klaim/Laporan Hasil Verifikasi.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal:

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.xx.xx	Kas di BLUD	xxx	
1.1.4.xx.xx.	Pendapatan Layanan		xxx
2.1.5.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	
1.1.6.01.01	Kas Dana Droping Jamkesmas Pusat		xxx

contoh :

Diterima pembayaran klaim atas pasien peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat bernama Mita yang menjalani rawat inap delapan hari dengan total biaya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.02.01	Kas di BLUD	2.000.000	
1.1.4.07.01	Pendapatan Layanan		2.000.000

2.1.5.04.01	Pendapatan Diterima Dimuka	2.000.000	
1.1.6.01.01	Kas Dana Droning Jamkesmas Pusat		2.000.000

7. pencatatan transaksi penerimaan kas dari rekening kas Badan Layanan Umum Daerah oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Sumber : Cek.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal:

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.xx.xx.	Kas Kecil	xxx	
1.1.1.xx.xx.	Kas di BLUD		xxx

contoh:

Bendahara Pengeluaran menerima pengisian kas kecil sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Badan Layanan Umum Daerah.

Jurnal untuk mencatat pengisian kas kecil sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.04.02	Kas Kecil	5.000.000	
1.1.1.04.01	Kas di Badan Layanan Umum		5.000.000

8. pencatatan transaksi pengeluaran kas dari dana Badan Layanan Umum Daerah oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Sumber : Bukti Pembayaran.

Buku Jurnal : Jurnal Pengeluaran Kas Kecil.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Biaya .....	xxx	
	Aset Tetap .....	xxx	
	Panjar .....	xxx	
1.1.1.xx.xx.	Kas Kecil		xxx

contoh :

Dibayar dari kas kecil biaya pengecatan gedung kantor sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pembelian laptop sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan panjar untuk pembuatan garasi ambulance sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Jurnal untuk mencatat pengeluaran dari kas kecil sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
8.2.3.00.00	Biaya Pemeliharaan	4.000.000	
1.3.2.11.03	Komputer Note Book	8.000.000	
1.1.1.03.03	Uang Muka Belanja	5.000.000	
1.1.1.04.02	Kas Kecil		17.000.000

9. pencatatan transaksi pertanggungjawaban panjar dan pengembalian sisa panjar dari dana Badan Layanan Umum Daerah oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Sumber : Bukti Pembayaran, Bukti Pengembalian Panjar.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Biaya .....	xxx	
	Aset Tetap .....	xxx	
	Panjar .....		xxx
1.1.1.xx.xx.	Kas Kecil	xxx	
	Panjar .....		xxx

contoh:

Realisasi pembuatan garasi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari panjar yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), panjar tersebut dipertanggungjawabkan berikut pengembalian sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Jurnal untuk pertanggungjawaban panjar tersebut adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.3.3.01.02	Pagar Kantor (garasi)	4.000.000	
1.1.1.03.03	Uang Muka Belanja		4.000.000
1.1.1.04.02	Kas Kecil	1.000.000	
1.1.1.03.03	Uang Muka Belanja		1.000.000

10. pencatatan transaksi penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (SP2D UP/GU/TU) oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Sumber : Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (SP2D UP/TU).

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.xx.xx.	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
3.4.1.xx.xx.	R/K PPKD		xxx

contoh :

Diterima Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan (SP2D GU) oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Jurnal untuk pertanggungjawaban panjar tersebut adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000.0000	
3.4.1.01.01	R/K PPKD		15.000.0000

11. pencatatan transaksi pertanggungjawaban Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (SP2D UP/GU/TU) oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Sumber : Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan (SP2D GU).

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
8.x.x.xx.xx.	Biaya .....	xxx	
1.3.x.xx.xx.	Aset Tetap .....	xxx	
1.1.1.xx.xx.	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
3.4.1.xx.xx.	R/K PPKD	xxx	
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan dari APBD - Operasional		xxx
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan dari APBD - Investasi		xxx

contoh :

Dibayar pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya dibuatkan pertanggungjawaban atas Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan (SP2D GU).

Jurnal untuk mencatat pertanggungjawaban Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (SP2D UP/GU/TU) oleh Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
8.1.5.00.008	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000
3.4.1.01.01	R/K PPKD	5.000.000	
7.3.1.01.00	Pendapatan dari APBD - Operasional		5.000.000

12.pencatatan transaksi penyetoran sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan (UP/TU) ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran

Dokumen Sumber : Surat Tanda Setoran.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
3.4.1.xx.xx.	R/K PPKD	xxx	
1.1.1.xx.xx.	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

contoh :

Pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Bendahara Pengeluaran menyetorkan kembali kepada kas daerah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Jurnal untuk mencatat penyetoran sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan UP/TU ke kas daerah adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
3.4.1.01.01	R/K PPKD	1.000.000	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.000.000

### 13.pencatatan transaksi penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara Pengeluaran

Dokumen Sumber : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Buku Jurnal : Jurnal Umum

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
8.x.x.xx.xx.	Biaya .....	xxx	
1.3.x.xx.xx.	Aset Tetap .....(termasuk ADP)	xxx	
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan dari APBD - Operasional		xxx
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan dari APBD - Investasi		xxx

contoh :

Bendahara Pengeluaran menerima Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) dari kas daerah untuk pembayaran pembelian peralatan laboratorium sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.3.2.19.03	Alat-alat Laboratorium Kimia	125.000.000	
7.3.1.02.00	Pendapatan dari APBD - Investasi		125.000.000

14. pencatatan transaksi penerimaan kas atas pengembalian belanja dengan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Sumber : Surat Tanda Bukti Penerimaan

Buku Jurnal : Jurnal Umum

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.xx.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
8.x.x.xx.xx.	Biaya .....		xxx
1.3.x.xx.xx.	Aset Tetap .....		xxx

contoh:

Bendahara Pengeluaran menerima kelebihan pembayaran atas pembelian peralatan laboratorium sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas atas pengembalian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.500.000	
1.3.2.19.03	Alat-alat Laboratorium Kimia		2.500.000

- 15.pencatatan transaksi penyeteroran atas pengembalian belanja dengan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran.

Dokumen Sumber : Surat Tanda Setoran

Buku Jurnal : Jurnal Umum

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan dari APBD - Operasional	xxx	
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan dari APBD - Investasi	xxx	
1.1.1.xx.xx.	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Contoh :

Atas kelebihan pembayaran dari pembelian peralatan laboratorium sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan kembali ke kas daerah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jurnal untuk mencatat transaksi penyeteroran atas pengembalian belanja dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke kas daerah adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
7.3.1.02.00	Pendapatan dari APBD - Investasi	2.500.000	
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.500.000

## B. Jurnal Penyesuaian

1. pencatatan penyesuaian persediaan awal.

Dokumen Sumber : Memo Jurnal, Berita Acara (BA) Perhitungan  
Persediaan.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
8.x.x.xx.xx.	Biaya .....	xxx	
1.1.5.xx.xx	Persediaan .....		xxx

contoh :

Berdasarkan memo jurnal dan Berita Acara (BA) Perhitungan Persediaan akhir tahun sebelumnya jumlah persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Jurnal untuk mencatat penyesuaian saldo persediaan awal adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
8.1.5.00.008	Biaya Barang dan Jasa	5.000.000	
8.1.2.00.00	Biaya Bahan	15.000.000	
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor		5.000.000
1.1.5.03.05	Persediaan .....		15.000.000

## 2. pencatatan penyesuaian persediaan akhir.

Dokumen Sumber : Memo Jurnal, Berita Acara (BA) Perhitungan Persediaan.

Buku Jurnal : Jurnal Umum.

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.5.xx.x.	Persediaan .....	xxx	
8.x.x.xx.xx.	Biaya .....		xxx

contoh :

Berdasarkan Memo Jurnal dan Berita Acara (BA) Perhitungan Persediaan akhir tahun jumlah persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan obat-obatan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Jurnal untuk mencatat penyesuaian saldo persediaan akhir adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	5.000.000	
1.1.5.03.05	Persediaan .....	15.000.000	
8.1.5.00.008	Biaya Barang dan Jasa		5.000.000
8.1.2.00.00	Biaya Bahan		15.000.000

### C. Jurnal Penutup

## 1. pencatatan jurnal penutup rekening pendapatan

Dokumen Sumber : Memo Jurnal

Buku Jurnal : Jurnal Umum

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan .....	xxx	
7.x.x.xx.xx.	Pendapatan .....	xxx	
3.5.3.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan		xxx

Contoh :

Pada akhir tahun jumlah pendapatan karcis sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ambulance sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Farmasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Jurnal penutup yang diperlukan untuk mencatat jumlah seluruh pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
7.1.1.01.00	Pendapatan Administrasi	1.000.000.000	
7.1.1.02.00	Pendapatan Ambulance	50.000.000	
7.1.1.07.00	Pendapatan Farmasi	5.000.000.000	
3.5.3.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan		6.050.000.000

## 2. pencatatan jurnal penutup rekening biaya

Dokumen Sumber : Memo Jurnal

Buku Jurnal : Jurnal Umum

Jurnal :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
3.5.3.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	xxx	
8.x.x.xx.xx.	Biaya .....		xxx
8.x.x.xx.xx.	Biaya .....		xxx

contoh:

Pada akhir tahun jumlah biaya pegawai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) biaya bahan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) biaya barang dan jasa sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan biaya administrasi bank sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jurnal penutup yang diperlukan untuk mencatat jumlah seluruh biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
3.5.3.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	3.750.250.000	
8.1.1.00.00	Biaya Pegawai		2.000.000.000
8.1.2.00.00	Biaya Bahan		1.000.000.000
8.1.5.00.00	Biaya Barang dan Jasa		750.000.000
8.3.2.00.00	Biaya Administrasi Bank		250.000

## **BAB V**

### **PROSEDUR PENUTUPAN BUKU**

Prosedur penutupan buku dilakukan untuk mengetahui posisi saldo setiap akun dalam satu periode akuntansi laporan keuangan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa kebijakan akuntansi yang disepakati untuk diterapkan pada beberapa akun telah dijalankan secara konsisten. Prosedur penutupan buku meliputi langkah-langkah inventarisasi, perumusan jurnal penyesuaian yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi dan identifikasi jurnal penutup. Inventarisasi yang dilakukan atas beberapa akun, selain untuk meyakini konsistensi penerapan kebijakan akuntansi juga berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen yang cukup kuat untuk menjamin keakuratan dan keamanan akun-akun laporan keuangan sebagai berikut :

#### **1. Kas**

Inventarisasi/opname fisik kas pada akhir periode akuntansi mutlak dilakukan sebagai jaminan bahwa prosedur penerimaan maupun pengeluaran kas telah dilakukan dan dicatat dengan benar. Pemeriksaan dilakukan terhadap semua uang kas yang ada di tangan pengelola kas, baik kas kecil maupun kas bendaharawan.

Hasil pemeriksaan fisik kas dituangkan ke dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani oleh atasan langsung bendaharawan. Format Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas terlampir.

#### **2. Bank**

Langkah rekonsiliasi harus dilakukan untuk mendapatkan data saldo bank yang akurat sekaligus kontrol atas cek yang masih beredar dan setoran dalam perjalanan. Perbedaan saldo bank antara pembukuan Bendaharawan dengan pencatatan menurut bank (rekening koran bank) perlu dituangkan dalam lembar rekonsiliasi tersendiri untuk memberi gambaran mengenai penyebab terjadinya selisih. Saldo bank yang dilaporkan dalam neraca adalah saldo bank hasil rekonsiliasi.

Pada umumnya terdapat dua penyebab pokok terjadinya perbedaan antara saldo laporan bank dengan saldo bendaharawan, yaitu :

a. transaksi yang sudah dicatat oleh Bendaharawan tetapi belum dicatat oleh bank, antara lain :

- 1) cek yang masih belum diuangkan di bank oleh penerima cek (*outstanding cheque*);
- 2) setoran dalam perjalanan, yaitu setoran yang sudah dibukukan oleh bendaharawan tetapi belum dibukukan oleh bank (*deposit in transit*);
- 3) setoran yang sudah disetor dan dibukukan oleh bendaharawan tetapi bank memasukkan ke akun lain (salah posting).

b. transaksi yang terdapat dalam rekening koran bank tetapi belum dicatat dalam pembukuan Bendaharawan, antara lain :

- 1) biaya administrasi dan jasa bank yang dibebankan kepada bendaharawan yang baru diketahui setelah bendaharawan menerima rekening koran (R/K) bank;
- 2) pendebitan karena cek yang diterima bendaharawan dari pihak ketiga dan disetor ke bank ternyata kosong (tidak ada dananya);
- 3) adanya setoran untuk pihak lain yang masuk ke akun bendaharawan (salah posting).

Langkah kerja/prosedur pembuatan rekonsiliasi bank :

1. siapkan kertas kerja rekonsiliasi dengan format sebagai berikut :

Badan Layanan Umum Daerah RSUD Rekonsiliasi Bank per .....		
I. Saldo menurut bendaharawan per .....		Xxxx
I.a Tambah :	Xxxx	
I.b Kurang :	Xxxx	
		Xxxx
Saldo menurut bendaharawan yang telah disesuaikan		Xxxx
II. Saldo menurut R/K Bank per .....		Xxxx
II.a Tambah :	Xxxx	
II.b Kurang :	Xxxx	
		Xxxx
Saldo menurut bank yang telah disesuaikan		Xxxx

Jumlah Saldo menurut bendaharawan yang telah disesuaikan harus sama dengan Saldo menurut bank yang telah disesuaikan.;

2. bandingkan setoran-setoran yang tercantum dalam rekening koran (R/K) Bank dengan setoran-setoran yang tercantum dalam pembukuan bendaharawan. Catat setoran yang tidak cocok jumlahnya dan/atau setoran-setoran yang belum dicatat oleh bank;
3. buat daftar cek yang telah diuangkan di bank menurut nomor cek dan bandingkan dengan buku jurnal pengeluaran bendaharawan. Beri tanda pada buku jurnal bendaharawan atas pengeluaran yang belum nampak pada laporan bank. Cek yang sudah dibukukan pada buku jurnal bendaharawan tetapi belum nampak pada laporan bank berarti cek tersebut masih belum diuangkan oleh penerima cek;
4. kurangkan saldo menurut pembukuan bendaharawan atas semua pendebitan bank (biaya administrasi dan lain-lain.) yang tercantum dalam laporan bank;
5. tambahkan saldo menurut pembukuan bendaharawan atas semua pengkreditan bank (setoran pihak ketiga, jasa giro, dan lain-lain.) yang tercantum pada laporan bank;
6. periksa apakah ada cek dalam perjalanan menurut rekonsiliasi bank akhir bulan lalu yang masih juga belum diuangkan pada bulan ini. Jika ada, maka cek tersebut dimasukkan ke dalam cek yang masih dalam perjalanan (peredaran);
7. periksa bahwa setoran dalam perjalanan pada laporan bank akhir bulan lalu sudah dimasukkan (dikreditkan) dalam laporan bank;
8. buatlah rekonsiliasi bank sesuai format pada angka 1 diatas;
9. buatlah jurnal atas pendebitan (penambahan = I.a) dan pengkreditan (pengurangan = I.b) atas akun bendaharawan yang tercantum dalam rekening koran (R/K) Bank tetapi belum dicatat pada pembukuan bendaharawan dengan jurnal sebagai berikut :

Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Penambahan Bank:		
Bank	xxx	
Pendapatan		xxx
Pengurangan Bank:		
Biaya	xxx	
Bank		xxx

### 3. Piutang

Inventarisasi piutang dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada semua debitur minimal satu bulan sebelum periode akuntansi berakhir. Materi konfirmasi berkisar pada nilai piutang, tanggal jatuh tempo dan transaksi terjadinya piutang. Hasil konfirmasi digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan piutang berdasarkan umur piutang untuk menentukan besarnya cadangan penyisihan piutang. Saldo piutang pada akhir periode akuntansi diperoleh dengan menambahkan saldo piutang hasil konfirmasi dengan mutasi piutang yang terjadi selama periode konfirmasi.

### 4. Persediaan

Kebijakan akuntansi persediaan Rumah Sakit Umum Daerah untuk mencatat seluruh pembelian persediaan sebagai biaya, mengharuskannya untuk melakukan prosedur inventarisasi persediaan guna memastikan jumlah persediaan yang sebenarnya telah menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan. Penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan dan asumsi arus biaya metode First In First Out (FIFO). Nilai persediaan hasil inventarisasi fisik inilah yang akan dilaporkan sebagai Akun Persediaan dalam neraca sekaligus mengurangi akun Biaya Persediaan yang telah dicatat seluruhnya pada saat pembelian persediaan.

#### **5. Penyesuaian biaya akrual**

Penyesuaian atas biaya akrual dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kebijakan akuntansi atas biaya akrual telah diterapkan secara konsisten. Kebijakan akuntansi yang dimaksud menghendaki adanya perlakuan pengakuan biaya akrual yang didasarkan pada prinsip.

Dalam aplikasinya, penerapan prinsip tersebut memacu sikap cermat dan hati-hati dalam membuat pembebanan biaya akrual secara tepat dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Substansi berpikirnya adalah berapa jumlah beban yang sesungguhnya dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan pada tahun berjalan dari keseluruhan biaya yang dibayar dimuka maupun biaya yang masih harus dibayar.

#### **4. Penyesuaian Pendapatan Akrual**

Adanya kebijakan akuntansi untuk mengakui seluruh Pendapatan Diterima Dimuka sebesar nilai kas/setara kas yang diterima mengharuskan adanya penyesuaian dengan menghitung nilai Pendapatan Diterima Dimuka yang menjadi pendapatan sebenarnya pada periode berjalan.

---

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 11 JUNI 2010**

**KODE AKUN NERACA DAN  
KODE AKUN LAPORAN  
OPERASIONAL**

## **BAB I**

### **KODE AKUN NERACA**

<b><u>KODE AKUN</u></b>	<b><u>NAMA AKUN</u></b>
1.1.1.01.01.	Kas di Kas Daerah
1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD
1.1.1.02.02.	Kas di Bank Bendahara Penerimaan SKPD
1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran
1.1.1.03.03.	Uang Muka Belanja
1.1.1.03.04.	Bukti Pengeluaran yang Belum Dipertanggungjawabkan
1.1.1.04.01.	Kas di Badan Layanan Umum
1.1.1.04.02.	Kas Kecil
1.1.2.01.01	Investasi Jangka Pendek
1.1.4.07.01.	Piutang Usaha
1.1.4.08.01	Piutang Lain-lain
1.1.5.01.01.	Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.5.02.01.	Persediaan Alat Listrik
1.1.5.03.01.	Persediaan Bahan Baku Bangunan
1.1.5.03.02.	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
1.1.5.03.03.	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
1.1.5.03.04.	Persediaan Bibit Ternak
1.1.5.03.05.	Persediaan Obat-Obatan
1.1.5.03.06.	Persediaan Bahan Kimia
1.1.5.04.01.	Persediaan Perangko
1.1.5.04.02.	Persediaan Meterai
1.1.5.04.03.	Persediaan Kertas Segel
1.1.5.05.01.	Persediaan Bahan Bakar Minyak
1.1.5.06.01.	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1.1.6.01.01.	Dana Droning Yamkesmas Pusat
1.1.6.01.02.	Uang Muka Belanja
1.1.6.01.03	Biaya Dibayar Dimuka
1.3.1.00.00.	Tanah
1.3.1.01.01.	Tanah Kantor .....
1.3.1.02.01.	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit .....

- 1.3.1.03.01. Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas .....
- 1.3.1.04.01. Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik .....
- 1.3.2.00.00. Peralatan dan Mesin
  - 1.3.2.01.01. Traktor
  - 1.3.2.01.02. Buldoser
  - 1.3.2.01.03. Stoom Walse
  - 1.3.2.01.04. Eskavator
  - 1.3.2.01.05. Dump Truk
  - 1.3.2.01.06. Crane
  - 1.3.2.01.07. Kendaraan Penyapu Jalan
  - 1.3.2.01.08. Mesin Pengolah Semen
  - 1.3.2.01.09. Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)
  - 1.3.2.02.01. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
  - 1.3.2.02.02. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep
  - 1.3.2.02.03. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
  - 1.3.2.02.04. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus
  - 1.3.2.02.05. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus
  - 1.3.2.02.06. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck
  - 1.3.2.02.07. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air,Minyak,Tinja)
  - 1.3.2.02.08. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks
  - 1.3.2.02.09. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up
  - 1.3.2.02.10. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
  - 1.3.2.02.11. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran
  - 1.3.2.02.12. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
  - 1.3.2.02.13. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator
  - 1.3.2.02.14. Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan
  - 1.3.2.02.15. ....
  - 1.3.2.03.01. Gerobak
  - 1.3.2.03.02. Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong
  - 1.3.2.03.03. Becak
  - 1.3.2.03.04. Sepeda
  - 1.3.2.03.05. Karavan
  - 1.3.2.03.06. ....
  - 1.3.2.07.01. Mesin Las
  - 1.3.2.07.02. Mesin Bubut

1.3.2.07.03.	Mesin Dongkrak
1.3.2.07.04.	Mesin Kompresor
1.3.2.07.05.	.....
1.3.2.08.01.	Penggiling Hasil Pertanian
1.3.2.08.02.	Alat Pengering Gabah
1.3.2.08.03.	Mesin Bajak
1.3.2.08.04.	Alat Penetas
1.3.2.08.05.	.....
1.3.2.09.01.	Mesin Tik
1.3.2.09.02.	Mesin Hitung
1.3.2.09.03.	Mesin Stensil
1.3.2.09.04.	Mesin Fotocopy
1.3.2.09.05.	Mesin Cetak
1.3.2.09.06.	Mesin Jilid
1.3.2.09.07.	Mesin Potong Kertas
1.3.2.09.08.	Mesin Penghancur Kertas
1.3.2.09.09.	Papan Tulis Elektronik
1.3.2.09.10.	Papan Visual Elektronik
1.3.2.09.11.	Tabung Pemadam kebakaran
1.3.2.09.12.	.....
1.3.2.10.01.	Meja Gambar
1.3.2.10.02.	Almari
1.3.2.10.03.	Brankas
1.3.2.10.04.	Filling Kabinet
1.3.2.10.05.	White Board
1.3.2.10.06.	Penunjuk Waktu
1.3.2.10.07.	.....
1.3.2.11.01.	Komputer Mainframe/Server
1.3.2.11.02.	Komputer/PC
1.3.2.11.03.	Komputer Note Book
1.3.2.11.04.	Printer
1.3.2.11.05.	Scanner
1.3.2.11.06.	Monitor/Display
1.3.2.11.07.	CPU
1.3.2.11.08.	UPS/Stabilizer

- 1.3.2.11.09. Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
- 1.3.2.11.10. Peralatan Jaringan Komputer
- 1.3.2.11.11. ....
- 1.3.2.12.01. Meja Kerja
- 1.3.2.12.02. Meja Rapat
- 1.3.2.12.03. Meja Makan
- 1.3.2.12.04. Kursi Kerja
- 1.3.2.12.05. Kursi Rapat
- 1.3.2.12.06. Kursi Makan
- 1.3.2.12.07. Tempat Tidur
- 1.3.2.12.08. Sofa
- 1.3.2.12.09. Rak Buku/TV/Kembang
- 1.3.2.12.10. ....
- 1.3.2.13.01. Tabung Gas
- 1.3.2.13.02. Kompor Gas
- 1.3.2.13.03. Lemari Makan
- 1.3.2.13.04. Dispenser
- 1.3.2.13.05. Kulkas
- 1.3.2.13.06. Rak Piring
- 1.3.2.13.07. Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau dls
- 1.3.2.13.08. ....
- 1.3.2.14.01. Lampu Hias
- 1.3.2.14.02. Jam Dinding/Meja
- 1.3.2.14.03. ....
- 1.3.2.15.01. Kamera
- 1.3.2.15.02. Handycam
- 1.3.2.15.03. Proyektor
- 1.3.2.15.04. ....
- 1.3.2.16.01. Telepon
- 1.3.2.16.02. Faksimili
- 1.3.2.16.03. Radio SSB
- 1.3.2.16.04. Radio HF/FM (Handy Talky)
- 1.3.2.16.05. Radio VHF
- 1.3.2.16.06. Radio UHF

1.3.2.16.07.	Alat Sandi
1.3.2.16.08.	.....
1.3.2.17.01.	Timbangan
1.3.2.17.02.	Teodolite
1.3.2.17.03.	Alat Uji Emisi
1.3.2.17.04.	Alat GPS
1.3.2.17.05.	Kompas/Peralatan Navigasi
1.3.2.17.06.	Bejana Ukur
1.3.2.17.07.	Barometer
1.3.2.17.08.	Seismograph
1.3.2.17.09.	Ultrasonogrph
1.3.2.17.10.	.....
1.3.2.18.01.	Alat-Alat Kedokteran Umum
1.3.2.18.02.	Alat-Alat Kedokteran Gigi
1.3.2.18.03.	Alat-Alat Kedokteran THT
1.3.2.18.04.	Alat-Alat Kedokteran Mata
1.3.2.18.05.	Alat-Alat Kedokteran Bedah
1.3.2.18.06.	Alat-Alat Kedokteran Anak
1.3.2.18.07.	Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1.3.2.18.08.	Alat-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1.3.2.18.09.	Alat-Alat Kedokteran Kardiologi
1.3.2.18.10.	Alat-Alat Kedokteran Neurologi
1.3.2.18.11.	Alat-Alat Kedokteran Orthopedi
1.3.2.18.12.	Alat-Alat Kedokteran Hewan
1.3.2.18.13.	Alat-Alat Farmasi
1.3.2.18.14.	Alat-Alat Penyakit Dalam/Internist
1.3.2.18.15.	.....
1.3.2.19.01.	Alat-Alat Laboratorium Biologi
1.3.2.19.02.	Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi
1.3.2.19.03.	Alat-Alat Laboratorium Kimia
1.3.2.19.04.	Alat-Alat Laboratorium Pertanian
1.3.2.19.05.	Alat-Alat Laboratorium Peternakan
1.3.2.19.06.	Alat-Alat Laboratorium Perkebunan

- 1.3.2.19.07. Alat-Alat Laboratorium Perikanan
- 1.3.2.19.08. Alat-Alat Laboratorium Bahasa
- 1.3.2.19.09. Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah
- 1.3.2.19.10. ....
- 1.3.2.20.08. Pentungan
- 1.3.2.20.09. Helm
- 1.3.2.20.10. Alarm/Sirene
- 1.3.2.20.11. Sentolop/Senter
- 1.3.2.20.12. ....
- 1.3.3.00.00. Gedung dan Bangunan
- 1.3.3.01.01. Gedung Kantor .....
- 1.3.3.01.02. ....
- 1.3.3.02.01. Gedung Rumah Jabatan .....
- 1.3.3.02.02. ....
- 1.3.3.03.01. Gedung Rumah Dinas .....
- 1.3.3.03.02. ....
- 1.3.3.04.01. Gedung Gudang .....
- 1.3.3.04.02. ....
- 1.3.3.05.01. Bangunan Bersejarah .....
- 1.3.3.05.02. ....
- 1.3.3.06.01. Bangunan Monumen .....
- 1.3.3.06.02. ....
- 1.3.3.07.01. Tugu Peringatan .....
- 1.3.3.07.02. ....
- 1.3.4.00.00. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 1.3.4.01.01. Jalan .....
- 1.3.4.01.02. Jalan Fly Over
- 1.3.4.01.03. Jalan Under Pass
- 1.3.4.01.04. ....
- 1.3.4.02.01. Jembatan Gantung
- 1.3.4.02.02. Jembatan Ponton
- 1.3.4.02.03. Jembatan Penyeberangan Orang
- 1.3.4.02.04. Jembatan Penyeberangan di Atas Air
- 1.3.4.02.05. ....
- 1.3.4.03.01. Jaringan Irigasi/Waduk/Bendungan

- 1.3.4.03.02. Jaringan Air Bersih/Air Minum
- 1.3.4.03.03. Reservoir
- 1.3.4.03.04. Pintu Air
- 1.3.4.03.05. ....
- 1.3.4.04.01. Lampu Hias Jalan
- 1.3.4.04.02. Lampu Hias Taman
- 1.3.4.04.03. Lampu Penerang Hutan Kota
- 1.3.4.04.04. ....
- 1.3.4.05.01. Instalasi Listrik
- 1.3.4.05.02. Instalasi Telepon
- 1.3.4.05.03. ....
- 1.3.5.00.00. Aset Lainnya
- 1.3.5.01.01. Buku Matematika
- 1.3.5.01.02. Buku Fisika
- 1.3.5.01.03. Buku Kimia
- 1.3.5.01.04. Buku Biologi
- 1.3.5.01.05. Buku Biografi
- 1.3.5.01.06. Buku Geografi
- 1.3.5.01.07. Buku Astronomi
- 1.3.5.01.08. Buku Arkeologi
- 1.3.5.01.09. Buku Bahasa dan Sastra
- 1.3.5.01.10. Buku Keagamaan
- 1.3.5.01.11. Buku Sejarah
- 1.3.5.01.12. Buku Seni dan Budaya
- 1.3.5.01.13. Buku Ilmu Pengetahuan Umum
- 1.3.5.01.14. Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
- 1.3.5.01.15. Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
- 1.3.5.01.16. Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 1.3.5.01.17. Buku Ensiklopedia
- 1.3.5.01.18. Buku Kamus Bahasa
- 1.3.5.01.19. Buku Ekonomi dan Keuangan
- 1.3.5.01.20. Buku Industri dan Perdagangan
- 1.3.5.01.21. Buku Peraturan Perundang-Undangan
- 1.3.5.01.22. Buku Naskah
- 1.3.5.01.23. Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disc)

1.3.5.01.24.	Mikro Film
1.3.5.01.25.	Peta/Atlas/Globe
1.3.5.01.26.	.....
1.3.5.02.01.	Lukisan/Foto
1.3.5.02.02.	Patung
1.3.5.02.03.	Ukiran
1.3.5.02.04.	Pahatan
1.3.5.02.05.	Batu Alam
1.3.5.02.06.	Maket/Miniat/Diorama
1.3.5.02.07.	.....
1.3.5.03.01.	Hewan Kebun Binatang
1.3.5.03.02.	Ternak
1.3.5.03.03.	Tanaman
1.3.5.03.04.	.....
1.3.6.01.01.	Bangunan Dalam Pengerjaan .....
1.3.6.01.02.	.....
1.3.7.01.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....
1.3.7.01.02.	.....
1.4.1.01.01.	Dana Cadangan .....
1.4.1.01.02.	.....
1.5.1.01.01.	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas Roda Empat
1.5.1.01.02.	Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas Roda Dua
1.5.1.01.03.	.....
1.5.1.02.01.	Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas Pejabat
1.5.1.02.02.	Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas DPRD
1.5.1.02.03.	.....
1.5.2.01.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah .....
1.5.2.01.02.	.....
1.5.3.01.01.	Build, Operate, Transfer (BOT) .....
1.5.3.02.01.	Build, Operate, Transfer (BOT) .....
1.5.3.03.01.	Kerjasama Operasi (KSO) .....
1.5.3.03.02.	.....
1.5.4.01.01.	Aset Tidak Berwujud .....
1.5.4.01.02.	.....

1.5.5.01.01.	Aset Lain-Lain .....
1.5.5.01.02.	.....
1.5.6.01.01.	.....
2.1.1.01.01.	Utang Taspen
2.1.1.02.01.	Utang Askes
2.1.1.03.01.	Utang PPh Pasal 21
2.1.1.03.02.	Utang PPh Pasal 22
2.1.1.03.03.	Utang PPh Pasal 23
2.1.1.04.01.	Utang PPN
2.1.1.05.01.	Utang Taperum
2.1.1.06.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2.1.2.01.01.	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2.1.2.02.01.	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya .....
2.1.2.02.02.	.....
2.1.2.03.01.	Utang Bunga kepada BUMN .....
2.1.2.03.02.	Utang Bunga kepada BUMD .....
2.1.2.03.03.	.....
2.1.2.04.01.	Utang Bunga kepada Bank .....
2.1.2.04.02.	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan .....
2.1.2.04.03.	.....
2.1.2.05.01.	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya .....
2.1.2.05.02.	.....
2.1.2.06.01.	Utang Bunga Luar Negeri .....
2.1.2.06.02.	.....
2.1.3.01.01.	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
2.1.3.02.01.	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
2.1.3.03.01.	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2.1.4.01.01.	Utang Bank
2.1.4.02.01.	Utang Obligasi
2.1.4.03.01.	Utang Pemerintah Pusat
2.1.4.04.01.	Utang Pemerintah Provinsi .....
2.1.4.04.02.	.....
2.1.4.05.01.	Utang Pemerintah Kabupaten .....
2.1.4.05.02.	Utang Pemerintah Kota .....
2.1.4.05.03.	.....

2.1.5.01.01.	Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak III .....
2.1.5.02.01.	Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari Pihak III .....
2.1.5.03.01.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah .....
2.1.5.04.01.	Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.5.04.02.	Pendapatan Diterima Dimuka - Yankesmas
2.1.6.01.01.	Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.1.01.01.	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan .....
2.2.1.01.02.	.....
2.2.1.02.01.	Utang Dalam Negeri - Obligasi .....
2.2.1.02.02.	.....
2.2.1.03.01.	Utang Pemerintah Pusat
2.2.1.04.01.	Utang Pemerintah Provinsi .....
2.2.1.04.02.	.....
2.2.1.05.01.	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota .....
2.2.1.05.02.	.....
2.2.2.01.01.	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan .....
2.2.2.01.02.	.....
2.3.1.01.01.	Uang Muka dari Bendahara Umum Daerah
2.3.2.01.01.	Pendapatan yang Ditangguhkan
3.4.1.01.01.	RK PPKD
3.5.1.00.00.	Ekuitas Awal
3.5.2.00.00.	Surplus dan Defisit Tahun Lalu
3.5.3.00.00.	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
3.5.4.00.00.	Ekuitas Donasi

## BAB II

### KODE AKUN LAPORAN OPERASIONAL

<u>KODE AKUN</u>	<u>NAMA AKUN</u>
7.1.1.01.00.	Poliklinik dan Tindakan
7.1.1.02.00.	Perawatan
7.1.1.03.00.	Instalasi Bedah
7.1.1.04.00.	Laboratorium
7.1.1.05.00.	Radiologi
7.1.1.06.00.	Persalinan
7.1.1.07.00.	Apotik
7.1.1.08.00.	Ambulance
7.1.1.09.00.	Lain-Lain dan Parkir
7.1.1.10.00.	Rawat Inap
7.1.1.11.00.	Jamkesmas
7.1.1.99.00.	Penyesuaian Kontraktual
7.2.1.01.00.	Hibah Terikat
7.2.1.02.00.	Hibah Tidak Terikat
7.3.1.01.00.	Pendapatan dari APBD-Operasional
7.3.1.02.00.	Pendapatan dari APBD-Investasi
7.4.1.01.00.	Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain
7.4.1.02.00.	Hasil Penjualan Kekayaan yang Tidak Dipisahkan
7.4.1.03.00.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan
7.4.1.04.00.	Jasa giro
7.4.1.05.00.	Pendapatan bunga
7.4.1.06.00.	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
7.4.1.07.00.	Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD
7.4.1.08.00.	Hasil investasi
8.1.0.00.00.	Biaya Operasional
8.1.1.00.00.	Biaya pegawai
8.1.2.00.00.	Biaya bahan
8.1.3.00.00.	Biaya jasa pelayanan
8.1.4.00.00.	Biaya pemeliharaan
8.1.5.00.00.	Biaya barang dan jasa

8.1.6.00.00.	Biaya pelayanan lain-lain
8.2.0.00.00.	Biaya Non Operasional
8.2.1.00.00.	Biaya pegawai
8.2.2.00.00.	Biaya Administrasi Kantor
8.2.3.00.00.	Biaya Pemeliharaan
8.2.4.00.00.	Biaya Barang dan Jasa
8.2.5.00.00.	Biaya Promosi
8.2.6.00.00.	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
8.3.1.00.00.	Biaya Bunga
8.3.2.00.00.	Biaya Administrasi Bank
8.3.3.00.00.	Biaya Lain-lain

### BAB III

## PENJELASAN KODE AKUN

Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi sangatlah beragam, sehingga untuk dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan yang sistematis dan mudah dimengerti, maka transaksi keuangan yang sejenis atau dianggap sejenis dibukukan dalam satu kelompok yang disebut *Akun*.

Bagan Akun dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk pencatatan transaksi-transaksi keuangan agar didapat suatu pengelompokan yang tertib dan seragam.

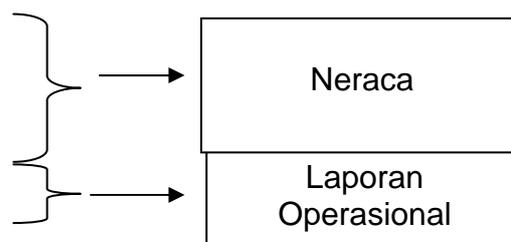
Selanjutnya, untuk memudahkan pengelompokan dan pencatatan, serta mencari Akun yang diinginkan, diperlukan pemberian kode untuk setiap klasifikasi Akun. Disamping itu, juga dilakukan klasifikasi berdasarkan klasifikasi laporan keuangan.

Bagan Akun dan Kode Akun yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengeloan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana digunakan oleh Pemerintah Daerah. Apabila dikemudian hari Pemerintah Daerah merubah dasar hukum pembukuannya, maka akan dilakukan perubahan terhadap pedoman ini.

Terhadap Kode Akun Laporan Realisasi Anggaran diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

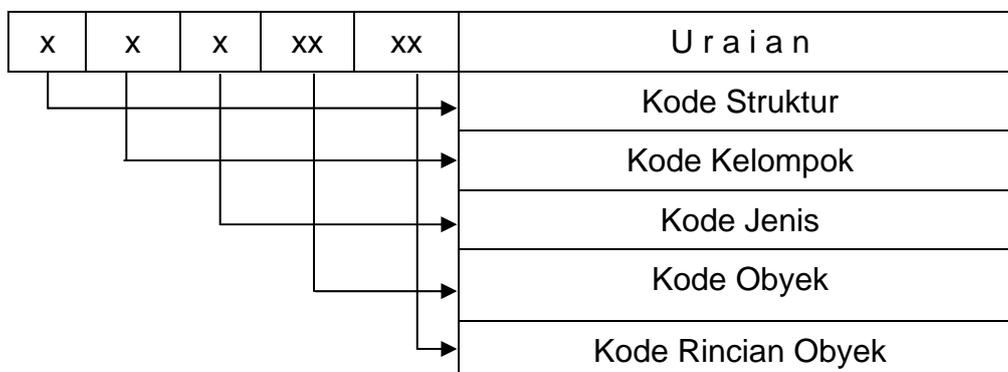
Adapun klasifikasi Akun berdasarkan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana
4. Pendapatan
5. Biaya



Susunan Bagan Akun yang ditampilkan di dalam lampiran buku ini dengan pertimbangan kepraktisan adalah Kode Akun yang umum digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Susunan Bagan Akun yang digunakan untuk pembukuan adalah sebagai berikut:



Bagan Struktur Akun, yaitu:

<u>Kode</u>	<u>Uraian Kode</u>
1	= Aset
2	= Kewajiban
3	= Ekuitas
7	= Pendapatan
8	= Biaya

Untuk memudahkan menggunakan Kode Akun secara tepat, diperlukan penjelasan penggunaan Akun secara terinci. Berikut ini diuraikan penjelasan masing-masing Akun dengan sistematika sebagai berikut : nama Akun/kode Akun, definisi, saldo normal, dan keterangan yang berkaitan.

Bagan akun disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam penerapannya dimungkinkan untuk menambah kode akun sesuai kondisi di lapangan.

## 1. Akun Aset

### 1) Aset Lancar

Pengertian : Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dalam satu periode akuntansi dan memenuhi salah satu kriteria berikut :

- (1) berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;
- (2) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca;
- (3) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan.

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : aset lancar terdiri atas : kas dan bank, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar dimuka.

#### **Kas dan Setara**

**Kas** : 1.1.1

Pengertian : Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Layanan Umum Daerah.

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : terdiri atas uang tunai/tabungan/giro di :

- Bendahara Penerima.
- Bendahara Pengeluaran, termasuk Kas Kecil.
- Rumah Sakit Umum Daerah.

**Investasi Jangka****Pendek** : 1.1.2

Pengertian : Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : investasi jangka pendek antara lain terdiri dari saham, obligasi, dan deposito jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

**Piutang Usaha** : 1.1.4.07.01

Pengertian : Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Keterangan : piutang terdiri atas piutang Asuransi Kesehatan, piutang Jaminan Kesehatan Masyarakat, Piutang Jaminan Kesehatan Daerah, Piutang Kerjasama, Piutang Pasien Umum.

Saldo Normal : Debet.

**Piutang Lain-Lain** : 1.1.4.08.01

Pengertian : merupakan piutang yang timbul bukan dari penyerahan jasa layanan kesehatan.

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : terdiri atas piutang tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi.

## **Cadangan**

### **Penyisihan Piutang : 1.1.7**

Pengertian : Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian karena adanya piutang yang tidak tertagih, perlu dibentuk cadangan penyisihan piutang. Besarnya cadangan penyisihan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang dianut oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Saldo Normal : Kredit.

Keterangan : terdiri atas penyisihan piutang usaha.

### **Persediaan : 1.1.5**

Pengertian : Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi.

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : terdiri atas alat tulis kantor (termasuk barang cetakan), alat listrik, material/bahan (yaitu: persediaan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan makanan pokok dan bahan/alat kebersihan habis pakai), benda pos, bahan bakar.

**Biaya Dibayar**

**Dimuka** : 1.1.6

**Pengertian** : Biaya Dibayar Dimuka adalah penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

**Saldo Normal** : Debet.

**Keterangan** : sewa dibayar dimuka.

**Aset Tetap** : 1.3

**Pengertian** : Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**Saldo Normal** : Debet.

**Keterangan** : terdiri atas :

1. tanah;
2. peralatan dan mesin (alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium);
3. gedung dan bangunan (bangunan gedung, monumen);
4. jalan, irigasi, dan jaringan (jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan);

5. aset tetap lainnya (buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman, alat persenjataan/keamanan);
6. konstruksi dalam pengerjaan.

## **Akumulasi**

### **Penyusutan Aset**

**Tetap** : 1.3.7

**Pengertian** : Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

**Saldo Normal** : Kredit.

**Keterangan** : terdiri atas penyusutan : peralatan dan mesin (alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium).  
gedung dan bangunan (bangunan gedung, monumen).  
jalan, irigasi, dan jaringan (jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan).  
aset tetap lainnya (buku perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman, alat persenjataan/keamanan).

<b>Aset Lainnya</b>	: 1.5
Pengertian	: Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap.
Saldo Normal	: Debet
Keterangan	: terdiri atas : aset tidak berwujud, aset kerja sama operasi, aset lainnya.

## 2. Akun Kewajiban

### Kewajiban

<b>Jangka Pendek</b>	: 2.1
Pengertian	: Utang jangka pendek (lancar) merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
Saldo Normal	: Kredit.
Keterangan	: Utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, pendapatan diterima dimuka, utang jangka pendek lainnya.

## 3. Akun Ekuitas

<b>Ekuitas</b>	: 3
Pengertian	: Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Utang.
Saldo Normal	: Kredit.
Keterangan	: terdiri atas : Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal, Surplus dan Defisit Tahun Lalu, Surplus dan Defisit Tahun Berjalan, dan Ekuitas Donasi.
<b>R/K PPKD</b>	: 3.4.1
Pengertian	: merupakan rekening antara untuk menampung penerimaan dana oleh Bendahara Pengeluaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum dipertanggungjawabkan.
Saldo Normal	: Kredit.

**Ekuitas Awal** : 3.5.1  
 Pengertian : merupakan hak residual awal Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.  
 Saldo Normal : Kredit.

**Surplus dan Defisit** : 3.5.2  
**Tahun Lalu**  
 Pengertian : Surplus dan Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus dan Defisit pada periode-periode sebelumnya.

**Surplus dan Defisit** : 3.5.3  
**Tahun Berjalan**  
 Pengertian : Surplus dan Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

**Ekuitas Donasi** : 3.5.4  
 Pengertian : Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

#### 4. Akun Pendapatan Laporan Operasional.

**Pendapatan** : 7  
 Pengertian : Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas Rumah Sakit Umum Daerah selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Saldo Normal	:	Kredit.
Keterangan	:	Akun pendapatan terdiri atas Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional dan Penyesuaian Pendapatan.
<b>Pendapatan Operasional</b>	:	Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal Rumah Sakit Umum Daerah yang antara lain berupa jasa layanan kesehatan termasuk pula pendapatan dari penggunaan fasilitas umum milik rumah sakit, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan dropping dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
<b>Pendapatan Jasa Layanan</b>	:	7.1.1.
Pengertian	:	Pendapatan Pelayanan Kesehatan adalah pendapatan atas jasa-jasa pelayanan kesehatan.
Saldo Normal	:	Kredit.
Keterangan	:	Akun pendapatan jasa layanan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. administrasi/karcis;</li> <li>2. tindakan/operasi;</li> <li>3. rawat jalan;</li> <li>4. rawat inap;</li> <li>5. obat-obatan;</li> <li>6. phb/asuransi kesehatan;</li> <li>7. laboratorium;</li> <li>8. ambulance;</li> <li>9. jasa konsultasi medik;</li> <li>10. fasilitas umum;</li> <li>11. radiologi.</li> </ol>

<b>Penyesuaian Kontraktual</b>	:	7.1.1.99.
Pengertian	:	penyesuaian lebih/kurang yang terjadi karena perbedaan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Layanan Umum Daerah sesuai tarif Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Layanan Umum Daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Layanan Umum Daerah dari pasien peserta program Askes berupa penggantian klaim asuransi kesehatan atau selisih tarif Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Layanan Umum Daerah dengan tarif asuransi kesehatan.
Saldo Normal	:	Debet/Kredit.
Keterangan	:	--

**Pendapatan APBD/APBN**

Pengertian	:	Transaksi yang masuk ke Akun ini adalah penerimaan anggaran yang berasal dari otorisasi kredit anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Saldo Normal	:	Kredit.
Keterangan	:	Penerimaan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. dan Penerimaan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Pendapatan Non Operasional**

Pengertian	:	Penerimaan yang berasal dari hasil usaha kemitraan Rumah Sakit Umum Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak ketiga.
Saldo Normal	:	Kredit.
Keterangan	:	terdiri dari hasil usaha lainnya, pendapatan operasional lainnya.

### **5. Akun Biaya**

**Biaya** : 8

Pengertian : Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : biaya operasional dan biaya non operasional.

**Biaya Operasional** : 8.1

Pengertian : Seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi.

**Biaya Penyusutan**

Pengertian : Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat.

Saldo Normal : Kredit.  
 Keterangan : metode penyusutan yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Layanan Umum Daerah adalah metode garis lurus (*straight-line method*).

**Biaya Non** : 8.2

**Operasional**

Pengertian : Seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit Umum Daerah/Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Saldo Normal : Debet.

Keterangan : terdiri dari penyisihan piutang, penghapusan piutang, bunga dan administrasi bank dan beban non operasional lainnya.

**Penyetoran Dana ke**

**Kas Daerah**

Pengertian : Penyetoran kas ke Kas Daerah karena sesuatu hal, misalnya atas perintah Walikota untuk menyetorkan surplus anggaran.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : --

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004